



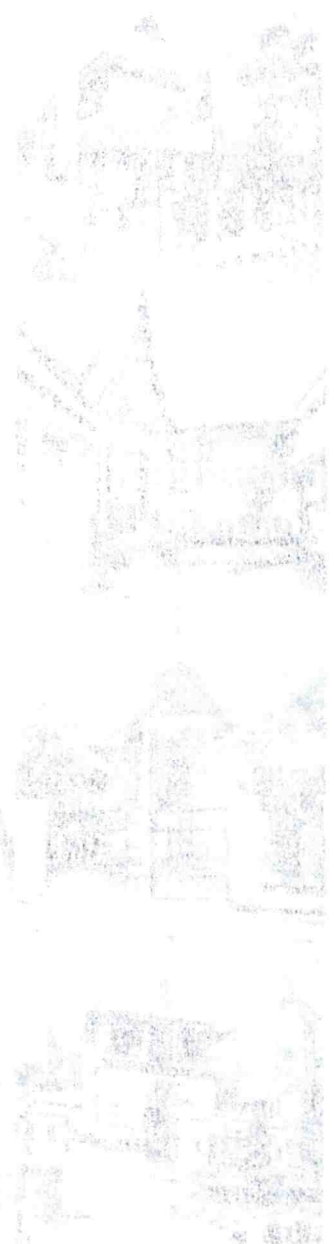
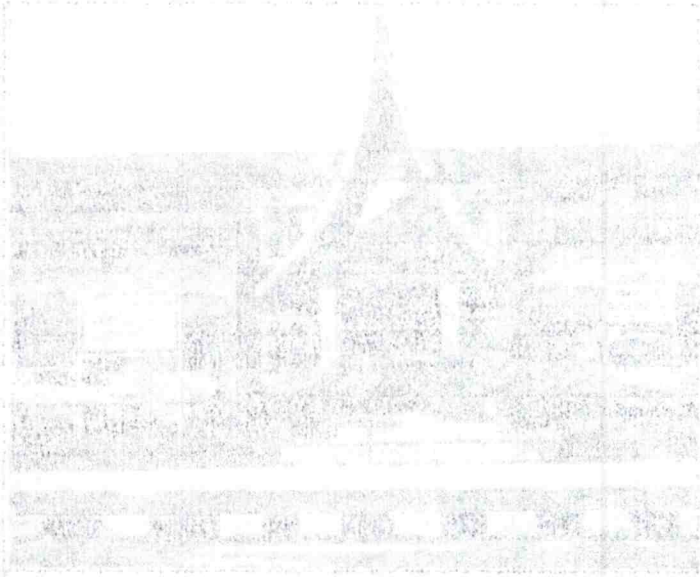
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018



**DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018**



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018



DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah- Nya sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018 dapat kami selesaikan .

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran Program dan Kegiatan dalam kurun waktu tahun anggaran 2018. Hal ini merupakanperwujudan akuntabilitas dan keterbukaan dalam rangkamewujudkan *Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Profesional* dalam instansi pemerintahan di Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan terutama menyangkut dengan pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan sebagaimana diamanatkan RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2014-2018 tentang kesehatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa datang.

Padang Panjang, Januari 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padang Panjang

Drs. Nuryanuwar, Apt. MM.M. Kes
NIP. 196201231991011 00

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan , dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota .Tugas pokok Dinas kesehatan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan peemrintah daerah di bidang kesehatn .Struktur Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja

Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, maka ditetapkan 2 tujuan yaitu : Peningkatan Pelayanan Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Dasar. Kegiatan yang di lakukan adalah perencanaan, perumusan kegiatan teknis penyelenggaraan program pembangunan di bidang kesehatan, program promosi kesehatan dan kesehatan penunjang, program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, gizi dan institusi serta kesejahteraan keluarga. kebijakan teknis program pencegahan dan pengamatan penyakit menular dan penyehatan lingkungan pemukiman. Kegiatan penyelenggaraan koordinasi baik lintas program, lintas sektoral dan sinkronisasi pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan OPD Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

DAFTAR ISI

Sampul Depan	
Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Dasar Pembentukan Organisasi	2
2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	4
3. Aspek Strategis Organisasi.....	5
4. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	4
5. Struktur Organisasi.....	6
6. Sumber Daya Manusia (SDM).....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018	
A. Visi-Kepala Daerah	20
B. Misi Kepala Daerah.....	20
C. Tujuan.....	20
D. Sasaran SKPD.....	21
E. Indikator Kinerja.....	21
F. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018.....	22
G. Rencana Strategis.....	23
H. Indikator Kinerja.....	26
I. Kebijakan.....	27
J. Program dan Kegiatan.....	27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018	33
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	36
C. Realisasi Anggaran.....	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1	Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018.....	14
Tabel.1.2	Tabel Data Ketenagaan Kesehatan Dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018.....	15
Tabel.2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan arah kebijakan Kepala Daerah Kota Padang Panjang.....	17
Tabel.2.2	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018.....	22
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018	23
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan SKPD Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018.....	25
Tabel 2.5	Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018.....	26
Tabel.2.6	Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Padang Panjang tahun 2018.....	28
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	34
Tabel.3.2	Jumlah Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2018.....	35
Tabel 3.3	Capaian Indikator Utama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018.....	37
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2017 dan 2018.....	37
Tabel 3.5	Capaian Indikator Utama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018.....	38
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Sasaran PHBS Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018.....	40

Tabel 3.7	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat Tahun 2018 terhadap Target Kinerja RPJM Tahun 2013 -2018 Dinas Kesehatan.....	44
Tabel 3.8	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Prilaku Hidup Bersih Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.....	44
Tabel 3.9	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Status Gizi Masyarakat.....	47
Tabel 3.10	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Kinerja RPJM Tahun 2013 -2018 Dinas Kesehatan.....	48
Tabel 3.11	Gambaran Status Gizi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018.....	49
Tabel 3.12	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pelayanan Dasar.....	50
Tabel 3.13	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Target Kinerja RPJM Tahun 2013 -2018 Dinas Kesehatan.....	51
Tabel 3.14	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan.....	53
Tabel 3.15	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2018 terhadap Target Kinerja RPJM Tahun 2013 -2018 Dinas Kesehatan.....	53
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran per Sasaran dan Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018.....	56

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah- Nya sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018 dapat kami selesaikan .

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran Program dan Kegiatan dalam kurun waktu tahun anggaran 2018. Hal ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan keterbukaan dalam rangka mewujudkan *Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Profesional* dalam instansi pemerintahan di Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan terutama menyangkut dengan pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan sebagaimana diamanatkan RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2014-2018 tentang kesehatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa datang.

Padang Panjang, Januari 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padang Panjang

Drs.Nuryanuwar,Apt.MM.M.Kes
NIP.196201231991011 00

WAT A PINDA WAT

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing Instansi Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menjalankan kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan berkewajiban untuk membuat laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang merupakan salah satu OPD yang mengemban dan melaksanakan tugas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Panjang Tahun 2014 – 2018 sesuai dengan bidang tugasnya yang tercantum dalam Tugas pokok dan fungsi, serta Organisasi dan Tata Laksana Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang pada Perda Nomor 33 Tahun 2016

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta norma-norma agama. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Pemerintah bertanggung jawab terhadap :

- a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
- b. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- c. Ketersediaan sumberdaya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yg setinggi-tingginya.
- d. merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yg setinggi-tingginya
- e. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- f. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan
- g. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau.
- h. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005–2025 pada tahap ke 3 Tahun 2013-2018, kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan

kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk itu Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang yang selanjutnya Untuk Dinas Kesehatan diatur tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang melalui berdasarkan Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2016.

2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang merupakan unsur berdasarkan Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2016 pelaksana Bidang Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

2. Tugas Pokok

Kedudukan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang merupakan unsur pelaksana Pemerintah mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dan tugas perbantuan dibidang kesehatan.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang mempunyai fungsi:

1. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program pembangunan di bidang kesehatan di Kota Padang Panjang.
2. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program Kesehatan dan Kesehatan Penunjang Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat.

3. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
4. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Program Jaminan Pelaksanaan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang.
5. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengamatan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
6. Pemberian perizinan, pengawasan institusi kesehatan, jasa, industri rumah tangga dan usaha di bidang kesehatan.
7. Penyelenggaraan urusan ketata usahaan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

3. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan Visi Misi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

4. Permasalahan Utama (strategic issued)

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah: Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kesehatan, Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah (RPJP dan RPJMD)

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Capaian perilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga masih kurang

2. Masih banyak penduduk yang belum menggunakan jamban sehat dan akses air bersih
3. Pengontrolan kualitas air minum masyarakat belum maksimal
4. Tingkat keberhasilan pengobatan penyakit TB Paru masih dibawah standar
5. Deteksi dini penyakit tidak menular (Jumlah Posbindu PTM) masih kurang
6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan sesuai kompetensi.
7. Sarana dan prasarana Puskesmas dalam mencapai pelayanan Puskesmas yang terakreditasi belum memadai
8. Prevalensi Balita gizi kurang/buruk masih diatas 3,5 %
9. Masih kurangnya Media Promosi Kesehatan bagi masyarakat

5. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang terdiri dari :

1. KEPALA DINAS KESEHATAN

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.

2. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi , pelaksanaan dan pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan Pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud sekretaris mempunyai fungsi :

- Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian
- Pengelolaan program administrasi keuangan

- Pengelolaan program administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari sub bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas Kesehatan:

2.1. Kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas sebagai menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepastakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan.

2.2. Kepala sub bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, Akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, melakukan perencanaan dan koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan Dinas, Evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisir data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

3. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT.

Mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas dinas kesehatan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, Gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, survailens dan immunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan kesehatan jiwa.

Bidang kesehatan masyarakat ,pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan gizi, keluarga dan masyarakat.
- Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian penyakit.
- Menyusun kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan jiwa dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang kesehatan masyarakat ,pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

3.1 Kepala Seksi kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan tekhnis dan supervisi serta pemnatauan ,evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat .

3.2 Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan ,Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan tekhnis dan supervisi serta pemantauan ,evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan , Kesehatan kerja dan olah raga.

ANALISIS PERKEMBANGAN MANAJERIAL

Perkembangan organisasi yang berkembang dan berkembang-besarnya
adalah juga dalam bentuk, perkembangan organisasi yang
berkaitan dengan organisasi di bidang manajemen lainnya.
Hal ini menunjukkan, organisasi yang berkembang juga dan lain
lain, menunjukkan dan menunjukkan perkembangan dan perkembangan
yang berkaitan dengan organisasi ini.

Perkembangan organisasi menunjukkan perkembangan dan perkembangan
yang berkaitan dengan organisasi ini.

- Perkembangan organisasi menunjukkan perkembangan dan perkembangan
yang berkaitan dengan organisasi ini.
- Perkembangan organisasi menunjukkan perkembangan dan perkembangan
yang berkaitan dengan organisasi ini.
- Perkembangan organisasi menunjukkan perkembangan dan perkembangan
yang berkaitan dengan organisasi ini.
- Perkembangan organisasi menunjukkan perkembangan dan perkembangan
yang berkaitan dengan organisasi ini.

Perkembangan organisasi menunjukkan perkembangan dan perkembangan
yang berkaitan dengan organisasi ini.

3.1 Model Model Struktur Organisasi dan Organisasi
Perkembangan organisasi menunjukkan perkembangan dan perkembangan
yang berkaitan dengan organisasi ini.

3.2 Model Model Struktur Organisasi, Manajemen dan
Perkembangan Organisasi
Perkembangan organisasi menunjukkan perkembangan dan perkembangan
yang berkaitan dengan organisasi ini.

3.3 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan ,evaluasi dan pelaporan di bidang survailens, Immunisasi,pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan jiwa.

4. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN , PROMOSI KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan ,termasuk peningkatan mutunya ,pelayanan kesehatan tradisional ,promosi dan pemberdayaan masyarakat , kefarmasian , alat kesehatan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan. Kepala bidang Pelayanan Kesehatan, promosi dan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pelayanan Kesehatan dan peningkatan mutu kesehatan.
- Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program promosi dan pemberdayaan masyarakat
- Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program program peningkatan mutu sumber daya manusia dalam kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan , promosi dan sumber daya kesehatan terdiri dari:

4.1 Kasi Pelayanan Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan

Mempunyai tugas melaksanakan peningkatan mutu fanyankes di Bidang pelayanan kesehatan primer dan

3.3. **Kelembagaan dan Penyelenggaraan**

Kelembagaan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program. Kelembagaan yang baik akan menjamin kelancaran pelaksanaan program dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan program, perlu diperhatikan aspek kelembagaan yang meliputi:

3.3.1. KELEMBAGAAN

Kelembagaan adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan program. Kelembagaan yang baik akan menjamin kelancaran pelaksanaan program dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan program, perlu diperhatikan aspek kelembagaan yang meliputi:

- **Struktur Organisasi**: Merupakan susunan dan pembagian tugas dalam organisasi.
- **Manajemen**: Merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
- **Kelembagaan**: Merupakan organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan program.
- **Kelembagaan**: Merupakan organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan program.
- **Kelembagaan**: Merupakan organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan program.
- **Kelembagaan**: Merupakan organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan program.

Kelembagaan yang baik akan menjamin kelancaran pelaksanaan program dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan program, perlu diperhatikan aspek kelembagaan yang meliputi:

pelayanan kesehatan rujukan, serta pelayanan kesehatan tradisional.

4.2 Kasi Promosi kesehatan ,Upaya Kesehatan berbasis masyarakat dan Pengobatan Tradisional.

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervisi serta pemetaan evaluasi dan pelaporan.

4.3 Kasi Sumber Daya Kesehatan dan Peningkatan Mutu

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemanfaatan , evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian , alat kesehatan dan PKRT dan sumber daya manusia kesehatan.

5. UPTD Puskesmas susunan organisasinya terdiri dari:

5.1 Kepala UPTD Puskesmas :

Mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis Dinas Kesehatan dibidang Pengelolaan Puskesmas meliputi bidang pemulihan kesehatan, perawatan dan rujukan, penyelenggaraan kebijakan teknis pencegahan, pemberantasan penyakit, pangkalan kesehatan keluarga dan penyuluhan kesehatan, penyelenggaraan kebijakan teknis pelayanan khusus dan penunjang kegiatan, penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana UPTD Puskesmas dan pengelolaan administrasi UPTD Puskesmas.

5.2 Kepala Subag Tata Usaha

Mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Puskesmas dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.

5.3 Kelompok Jabatan Fungsional di Puskesmas

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

6. UPTD Instalasi Farmasi (IFK) susunan Organisasinya terdiri dari :

6.1 Kepala UPTD Instalasi Farmasi (IFK)

Mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan Instalasi Farmasi meliputi bidang perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat, alat-alat kesehatan dan alat perbekalan lainnya serta pencatatan dan evaluasi.

6.2 Kepala Subag Tata Usaha IFK

Mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Instalasi Farmasi dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tatalaksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.

6.3 Kelompok Jabatan Fungsional di IFK

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2. **Kelembagaan dan Struktur Organisasi**

Kelembagaan dan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap unsur organisasi.

Struktur organisasi yang baik akan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.

2.3. **Kelembagaan dan Struktur Organisasi (KSO)**

Kelembagaan dan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap unsur organisasi. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.

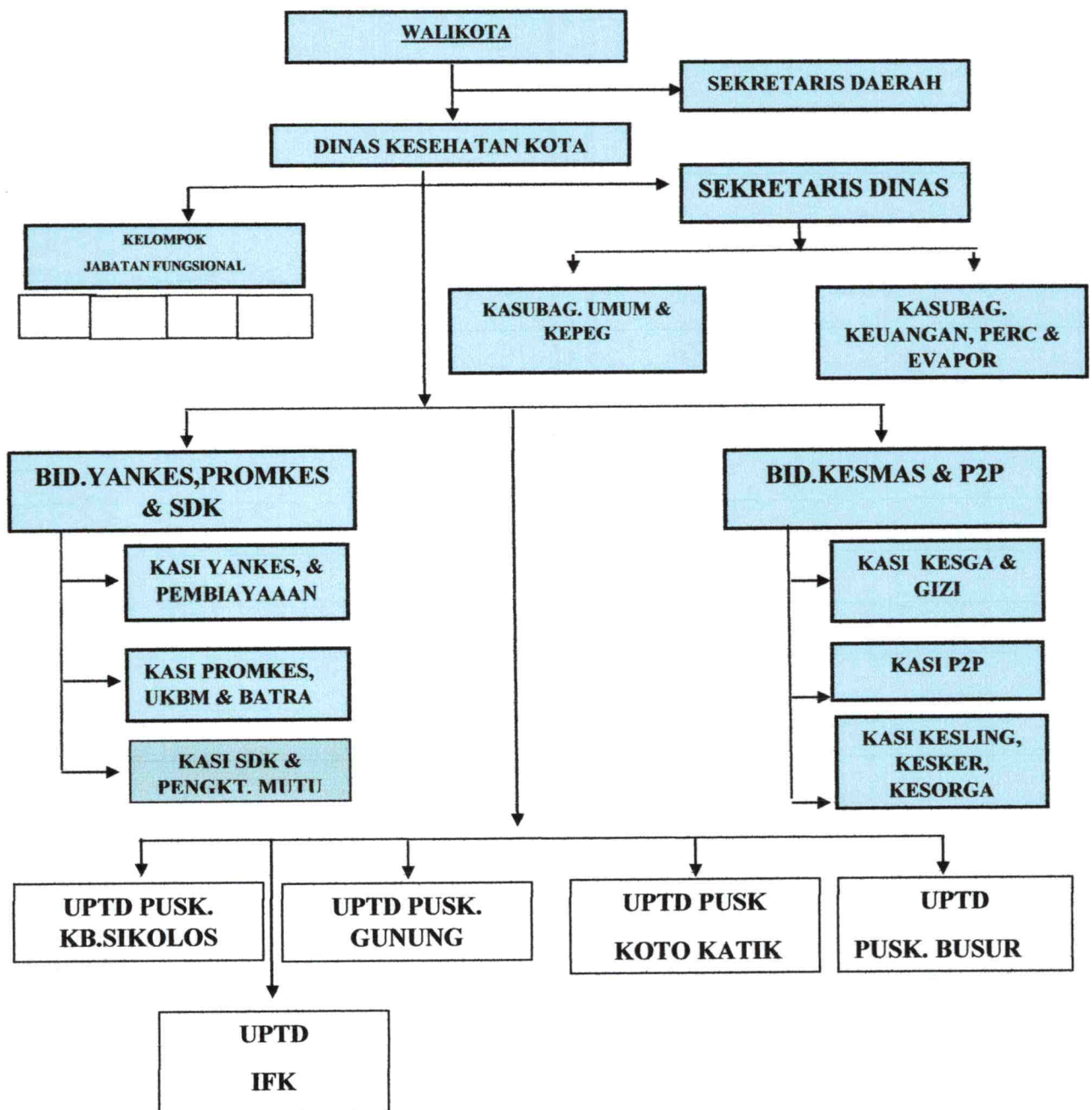
2.4. **Kelembagaan dan Struktur Organisasi (KSO)**

Kelembagaan dan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap unsur organisasi. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.

2.5. **Kelembagaan dan Struktur Organisasi (KSO)**

Kelembagaan dan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap unsur organisasi. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja DKK Padang Panjang



6. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang handal. Adapun Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2018 adalah sebanyak 189 orang dengan komposisi sebagai berikut:

TABEL 1.1
KOMPOSISI PEGAWAI DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018

NO	URAIAN	JUMLAH	JUMLAH TOTAL
1	Struktural, terdiri dari		
	Eselon II	1	1
	Eselon III	3	3
	Eselon IV	18	18
2	Fungsional Umum, Terdiri dari:		
	Golongan I	1	1
	Golongan II	3	3
	Golongan III	29	29
	Golongan IV	7	7

Sumber: Sub Bag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018

**TABEL 1.2 TABEL DATA KETENAGAAN KESEHATAN DILINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018**

DATA KETENAGAAN KESEHATAN DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG								
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG Keadaan Januari 2018								
NO	JENIS TENAGA	DINAS KESEHATAN	PUSK.GUNUNG	PUSK.KOTO KATIK	PUSK.BUKIT SURUNGAN	PUSK.KEBUN SIKOLOS	INSTALASI FARMASI	JUMLAH
1	Dokter Umum	1	2	2	3	2	0	10
2	Dokter Gigi	0	1	1	1	1	0	4
3	Perawat Ners (S-1)	2	2	0	0	0	0	4
4	Perawat (S-1)	0	0	1	0	0	0	1
5	Perawat (D-3)	1	8	1	9	4	0	23
6	Perawat (SPK)	1	2	4	2	5	0	14
7	Perawat Gigi (D-3)	0	0	1	1	2	0	4
8	Perawat Gigi (SPRG)	0	1	1	1	1	0	4
9	Bidan (D-4)	0	1	1	1	2	0	5
10	Bidan (D-3)	3	7	6	5	2	0	23
11	Bidan (D-1)	1	2	0	1	1	0	5
12	Apoteker (S-1)	1	0	0	1	0	2	4
13	Farmasi (D-3)	1	0	2	1	1	0	5
14	Asisten Apoteker (SMF)	1	1	0	1	1	1	5
15	SKM (S-1)	9	4	1	3	3	1	21
16	Kesmas (S-2)	6	0	0	0	0	1	7
17	Kesling (D-3)	1	1	1	1	1	0	5
18	Gizi (D-3)	1	0	1	1	1	0	4
19	Rekam Medis (D-3)	1	2	2	2	1	0	8
20	Analisis Kesehatan (D-3)	0	1	2	3	1	0	7
21	Analisis Kesehatan (SMAK)	0	0	0	0	1	0	1
22	Teknik Elektromedik (S-1)	1	0	0	0	0	0	1
23	Teknik Elektromedik (D-3)	1	0	0	0	0	0	1
24	Kimia Analis (D-3)	2	0	0	0	0	0	2
25	Umum (D-3 Akuntan)	1	0	0	0	0	0	1
26	Umum (SLTA)	4	1	1	2	0	0	8
	Jumlah	39	36	28	39	30	5	177

Ket.	1. dr. Rahmi Nurdin	Pusk. Bukit Surungan	Tugas Belajar	PPDS UNAND	An.Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Ka.Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian
	2. drg. Mira Lovita	Pusk. Bukit Surungan	Tugas Belajar	UGM Yogyakarta	
	3. Basri Novarita	Pusk. Gunung	Cuti Sakit		

Heni Agustini, SKM
NIP. 19830814 200802 2 002

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara review atas laporan kinerja instansi

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya pemerintah.

Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018.

Berikut Penjelasan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan :

TABEL: 2.1
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
KEPALA DAERAH KOTA PADANG PANJANG

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Kota Padang Panjang Amanah, Aman, dan Sejahtera	2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	3 Peningkatan Pelayanan Berbasis Masyarakat	4 Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	5 Meningkatnya Prilaku Hidup Bersih Sehat	6 Meningkatkan wawasan tentang kebijakan lingkungan sehat dan Meningkatkan Pengembangan Media Sosialisasi kota sehat ke pada masyarakat serta aktivasi Forum Kota Sehat tingkat kelurahan, kecamatan dan amatan dan kota

A. VISI

Visi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan di daerah, mempunyai visi:

“Kota Padang Panjang Amanah, Aman, dan Sejahtera”

Penjabaran dari Visi tersebut adalah Pemerintah daerah dan masyarakat Kota Padang Panjang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dan aman dari tindak kriminalitas serta menggambarkan kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi “Kota Padang Panjang Amanah, Aman, dan Sejahtera” maka Misi Dinas Kesehatan Berada Pada Misi ke-3 yaitu:

” Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat”

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (*das solen*) dan kenyataan (*das sein*), pada kurun waktu tertentu. Dalam mewujudkan misinya, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan berbasis masyarakat.

2. Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan dasar.

D. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: *SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness)* sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang menetapkan sasaran.

1. Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat
2. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar
4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

E. INDIKATOR KINERJA

Guna memudahkan pengukuran dan evaluasi kinerja, tujuan strategis dijabarkan menjadi beberapa sasaran strategis yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk tahun 2018 (sebagaimana tertera pada Pengukuran Kinerja tahun 2018) dan (sebagaimana pada Revisi Renstra Tahun 2018) adalah sebagai berikut:

TABEL: 2.2
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018

N	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1	Persentase Cakupan Prilaku Hidup Bersih Sehat	75 %
2	Capaian tatanan Kota Sehat	8 tatanan
3	Penurunan status Gizi Kurang	5 %
4	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai standart	80%
5	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	4 PKM
6	Pembangunan Puskesmas representatif (sesuai standar)	1 PKM

F. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun

TABLE 3
 LIST OF THE SUBSIDIARIES OF THE COMPANY
 IN THE YEAR 2018

Sl. No.	Name of the Subsidiary	Shareholding (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5. STATEMENT OF THE COMPANY'S

The Company has the following subsidiaries as on 31.03.2018:

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

2018. Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

TABEL: 2.3
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018

N	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	2	3		
1	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	1	Persentase Cakupan Prilaku Hidup Bersih Sehat	75%
		2	Capaian Tatanan Kota Sehat	8 tatana
2	Meningkatnya Status Gizi	1	Penurunan status Gizi Kurang	5%
3	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumaber Daya Manusia	1	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai standart	80%
4	Meningkatnya sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	1	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	4 Pkm
		2	Pembangunan Puskesmas representatif (sesuai	1 Pkm

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2018 terdapat 4 sasaran dengan 6 indikator.

G. RENCANA STRATEGI .

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah menyusun Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kota Padang Panjang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 –2018.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 - 2018. Disamping itu pula, Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Kesehatan, Bappenas dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dan *stakeholder*.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang hasil revisi dilihat pada table dibawah ini:

TABEL 2. 4
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Peningkatan Pelayanan Berbasis	2 Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	3 Meningkatnya Prilaku Hidup Bersih Sehat Capaian Tatanan Kota Sehat	4 Meningkatkan wawasan tentang kebijakan lingkungan sehat dan Meningkatkan Pengembangan Media Sosialisasi kota sehat ke pada masyarakatserta aktivasi Forum Kota Sehat tingkat kelurahan,kecamatan dan kota
	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Menurunnya status Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan pada bumil resti, balita kurang gizi dan pendampiangan keluarga kurang gizi dan kunjungan rumah rutin tiap minggu
Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumaber Daya Manusia (SDM)	Meningkatkan Jumlah dan Kompetensi Tenaga yang sesuai dengan standart	Mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan peningkatan keterampilan
	Meningkatnya sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas	Pendampingan akreditasi serta melengkapisarana dan prasarana
		Pembangunan Puskesmas yang representative sesuai standart	Penyedia tanah dan pembangunan puskesmas

H. INDIKATOR KERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Padang Panjang juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL: 2.5
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
1	Presentase anggota keluarga yang ber PHBS	%	75%
2	Persentase status gizi kurang	%	5%

dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018 terdapat 2 (dua) indikator kegiatan yaitu Presentase anggota keluarga yang ber PHBS dengan target 75% dan Persentase status gizi kurang dengan target 5%.

I. KEBIJAKAN

Adapun Kebijakan dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat
2. Meningkatkan kualitas penyuluhan melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh
3. Menegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok
4. Menegakan Perda Tata Bangunan
5. Menciptakan Keluarga Sadar Gizi Masyarakat
6. Mengadakan tenaga kesehatan
7. On Job Training
8. Relokasi dan tambahan tenaga kesehatan
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

J. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung kinerja sasaran dan indikator kinerja dari sasara maka di perlukan program- progam dan kegiatan kegiatan. Maka terdapat 16 Program dan 66 kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang pada Tahun 2018, sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah:

TABEL: 2.6

TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PADANG PANJANG TAHUN 2018

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
1	1	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat menyurat	Rp. 3.685.000
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 15.399.996
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 813.048.500
		4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Rp. 451.909.000
		5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 22.326.086
		6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 88.175.000
		7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 23.500.000
		8 Penyediaan Makan Minum	Rp. 24.300.000
		9 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kantor	Rp. 325.000.000
		10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 97.282.000
		11 Penyediaan Jasa Medis	Rp. 125.403.736
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 72.147.000
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 50.000.000
		3 Pemeliharaan/Berkala Alat-alat Kantor	Rp. 22.000.000

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	4	Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Rp. 2.962.200.000
		5	Penujiang Operasional DAK	Rp. 225.050.000
		1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 82.301.656
		2	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 150.000
		3	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Rp. 150.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran	Rp. 150.000
		5	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 150.000
		1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 145.200.000
		2	Pemurnahan Obat Rusak dan kadaluarsa	Rp. 26.575.000
		3	DAK Pelayanan Kefarmasian	Rp. 834.000.000
5	Program pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan	1	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Rp. 46.550.000
		2	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 3.900.000
		3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Rp. 10.580.000
		4	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Rp. 3.924.159.600
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Rp. 46.550.000
		2	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 3.900.000
		3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Rp. 10.580.000
		4	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Rp. 3.924.159.600

	5	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Rp. 190.975.200
	6	Peningkatan surveillance dan penanggulangan penyakit tidak menular	Rp. 147.825.000
	7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kebun Sikolos	Rp. 1.501.511.194
	8	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gunung	Rp. 745.940.651
	9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Koto Katik	Rp. 739.531.080
	10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bukit Surungan	Rp. 1.240.427.542
	11	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)	Rp. 2.947.506.910
	12	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Haji	Rp. 11.400.000
	13	Pelayanan P3K	Rp. 66.750.000
7	1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp. 49.550.000
	2	Sosialisasi dan Pemeriksaan Napza	Rp. 6.945.000
	3	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Obat Kosmetik dan Obat Tradisional	Rp. 17.500.000
8	1	Program Promosi Kesehatan dan Kesehatan dan	Rp. 46.750.000

pemberdayaan Masyarakat	2	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat	Rp. 58.250.0000
	3	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	Rp. 42.510.000
	4	Pengembangan Desa Siaga	Rp. 84.150.000
	5	Penerapan Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa rokok	Rp. 69.500.000
	1	Pemberian makanan tambahan dan vitamin	Rp. 36.700.000
9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2	Sosialisasi Penanggulangan Kurang energi Protein (KEP), Anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya	Rp. 31.130.000
	3	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga sadar Gizi	Rp. 5.552.000
	1	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Rp. 11.455.000
10 Program Pengembangan Lingkungan sehat	2	Forum Kota Sehat (Pengembangan Tatanan Kota Sehat)	Rp. 233.320.000
	3	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sekolah Sehat	Rp. 10.518.000
	4	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Rp. 18.525.000
	5	Pembakaran Sampah Medis	Rp. 23.600.000
	6	Sosialisasi Kesehatan Kerja dan Olah raga	Rp. 63.840.000
	1	Penyemprotan / fogging sarang nyamuk	Rp. 8.690.000
11 Program Pencegahan			

dan Penanggulangan Penyakit Menular	2	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Rp. 91.352.000
	3	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Rp. 27.000.000
	4	Pencegahan penularan penyakit endemik dan epidemik	Rp. 15.000.000
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Puskesmas	Rp. 69.000.000
12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Rp. 387.842.450
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	Rp. 83.000.000
	1	Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita	Rp. 8.650.000
13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Rp. 262.500.000
14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1	Pemetaan Ibu Hamil dan Penjarangan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Rp. 1.380.000
	2	Revitalisasi Gerakan sayung Ibu	Rp. 5.905.000
15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	3	DAK Non Fisik (Jampersal)	Rp. 1.121.007.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel

berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 >	Sangat Baik	
2.	76 – 90	Tinggi	
3.	66 – 75	Sedang	
4.	51 – 65	Rendah	
5.	≤50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Dalam melaksanakan program dan kegiatan bersama masyarakat menggunakan dana dari APBD Kota Padang Panjang dan APBN (DAK), Dalam pencapaian kinerja di atas dinas kesehatan juga mengacu kepada penetapan kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2018 serta rencana strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2014 – 2018 yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari OPD.

Dalam tahun 2018 dana yang teralokasi pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan yang dilaksanakan bersama masyarakat dengan menggunakan dana bersumber dari dana APBD dan DAK dengan rincian:

Tabel 3.2.
Jumlah Anggaran Belanja Langsung
Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018

NO 1	SUMBER ANGGARAN 2	JUMLAH 3
1	Dana APBD Kota Padang Panjang	Rp. 14.044.338.942
2	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp. 7.864.713.910
	JUMLAH	Rp. 21.909.052.852

Dalam rencana kerja tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang menetapkan 15(lima belas) program dan 69 (enam puluh Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kota Padang Panjang. Target pelaksanaan pada tahun 2018 yaitu 100% baik fisik maupun keuangan, ternyata hasil pencapaian realisasi keuangannya adalah Rp.15.596.294.611,- atau sebesar 74,04% dan realisasi fisik sebesar 98,24.%.

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang beserta target dan capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan berikut ini.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil kinerja pengukuran pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

TABEL: 3.3
CAPAIAN INDIKATOR UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA		TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA
1	Presentase anggota keluarga yang ber PHBS	75.00%	41.85%	55.80%
2	Persentase status gizi kurang	5.00%	5.50%	90%

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut ;

TABEL: 3.4
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 DAN 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1 Presentase anggota keluarga yang ber PHBS	70.00 %	75.00 %	61.64 %	41.85%	88.05 %	55.80 %
2 Persentase status gizi kurang	5.00 %	5.00 %	5.76%	5.50%	86%	90%

SASARAN I : Meningkatkan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase **Cakupan Prilaku Hidup Bersih Sehat dan Capaian Tatanan Kota Sehat**. Terlihat rata-rata capaian kinerja sasaran dari Persentase Cakupan Prilaku Hidup Bersih Sehat sebesar 41.85 % dan Capaian tatanan Kota Sehat sebanyak 8 tatanan dengan kriteria penilaian “ Sangat Baik”. Pada Indikator sasaran Persentase Cakupan Prilaku Hidup Bersih Sehat terdapat 10 Indikator dan 1 Indikator pada Capaian Tatanan Kota Sehat terlihat Pada tabel di bawah:

Tabel: 3.5

Pengukuran Kinerja Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		Capaian %
	2017	2018	2017	2018	
1 Persentase Cakupan Prilaku Hidup Bersih Sehat	70%	75%	61.64%	41.85%	55.80%
2 Capaian tatanan Kota Sehat	8 tatanan	8 tatanan	8 tatanan	8 tatanan	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Prilaku Hidup Bersih Sehat pada tahun 2018 adalah 41.85% dari target 75% dari jumlah rumah tangga 12.403 dan jumlah rumah tangga yang dipantau sebanyak 6.877 sedangkan rumah tangga yang ber PHBS sebesar 2.878.

Untuk Cakupan Prilaku Hidup Bersih Sehat Terdapat 10 Indikator seperti terlihat pada Tabel di Bawah:

Tabel. 3.6
Pengukuran Kinerja Sasaran PHBS

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018
1.	Persalinan dengan Tenaga Kesehatan	100%	98.20%
2.	ASI Eksklusif	62.19%	82.36%
3.	Timbang Balita	87.34%	85.94%
4.	Menggunakan Air Bersih	92.29%	93.91%
5.	CTPS	61.84%	56.82%
6.	Jamban Sehat	72.17%	75.32%
7.	Berantas Jentik	74.20%	84.19%
8.	Makan Buah dan Sayur	53.37%	63.79%
9.	Akfifitas Fisik	66.55%	75.32%
10	Tidak merokok Dalam Rumah	45.45%	57.02%

Pencapaian indikator kinerja sasaran Cakupan Prilaku Hidup Bersih Sehat dengan uraian sebagai berikut :

1. Persalinan dengan tenaga kesehatan pada tahun 2017 mencapai 100 %, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 98% dari angka ibu melahirkan di fasilitas kesehatan sebanyak 867 dibandingkan jumlah persalinan/sasaran pada tahun 2018 sebanyak 875.hal ini disebabkan oleh adanya ibu hamil yang saat melahirkan pulang ke kampungnya dan melahirkan dengan yang bukan tenaga kesehatan.

Sehingga tetap terdata melahirkan bukan dengan tenaga kesehatan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang panjang adalah meningkatkan upaya promotive, preventive terhadap ibu hamil untuk melahirkan pada tenaga kesehatan dan lebih mengintensifkan penyuluhan pada ibu hamil.

2. ASI Eksklusif pada tahun 2017 adalah 62.19%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 82.36% dari angka ibu yang ASI eksklusif sebanyak 414 di bandingkan dengan sasaran sebanyak 416 pada tahun 2018 faktor pendukungnya adalah program penyuluhan ASI Eksklusif terlaksanan dengan baik sehingga terjadi perubahan prilaku ibu untuk memberikan ASI saja sampai 6 bulan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang terus melakukan penyuluhan tentang ASI Eksklusi.
3. Timbang Balita pada tahun 2017 87.37%, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 85.94%. Jumlah timbang balita pada tahun 2018 sebanyak 1.861 dibandingkan jumlah sasaran sebanyak 2.175 hal ini disebabkan karena adanya perbedaan hitungan sasaran berdasarkan data dari Pusdatin dan kurangnya partisipasi orang tua untuk membawa anak balitanya ke posyandu. upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah meningkatkan penyuluhan dan motivasi kepada ibu yang memiliki anak balita untuk dapat membawa anaknya ke posyandu serta kunjungan rumah (ketuk pintu).
4. Menggunakan Air Bersih pada tahun 2017 sebesar 92.29%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 93.91%. rumah yang menggunakan air bersih pada tahun 2018 adalah sebanyak 6.174 dibandingkan jumlah sasaran yang pantau sebanyak 6.404 faktor

pendukung adanya dukungan lintas sektor dari Dinas Pekerjaan Umum (PU),Perkim LH dan PDAM.

5. CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) pada tahun 2017 61.84%, pada tahun 2018 menjadi 56.82%.Jumlah individu yang melaksanakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) adalah 13.290 dari sampel 20.510 hal ini mengalami penurunan.Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran/prilaku untuk hidup bersih.Usaha yang terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah memberikan penyuluhan/edukasi tentang pentingnya cuci tangan sehingga menjadi kebiasaan.
6. Jamban Sehat pada tahun 2017 kinerja kegiatannya 72.17% pada tahun 2018 naik menjadi 75.32%.Jumlah rumah yang menggunakan jamban sehat adalah sebanyak 5.083 di bandingkan dengan jumlah sasaran sebanyak 6.371.Hal ini disebabkan karena Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang terus melakukan upaya penyuluhan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sehingga masyarakat memahami pentingnya jamban sehat dan membuat jamban sehat.
7. Berantas Jentik Pada Tahun 2017 kinerja kegiatannya 74.20% pada Tahun 2018 naik menjadi 84.19% dari jumlah rumah yang melakukan berantas jentik sebanyak 5.790 di bandingkan sasaran sebanyak 6.877. Hal ini disebabkan keberhasilan program promosi preventif dan promotive yaitu memberikan penyuluhan bahwa pentingnya berantas jentik terumama di tempat-tempat yang bisa menampung air dimana itu merupakan tempat berkembang biaknya jentik.
8. Makan buah dan sayur pada tahun 2017 sebesar 53.37%, pada tahun 2018 kinerja kegiatannya naik menjadi 63.79% dari jumlah individu sebanyak 11.346 dibandingkan sasaran sebanyak 19.510

Faktor pendukung adalah program gerakan masyarakat (Germas) dan telah sadarnya masyarakat untuk mengkonsumsi buah dan sayur dan upaya ini akan terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

9. Aktifitas Fisik Pada tahun 2017 kinerja kegiatannya 66.55% pada tahun 2018 naik menjadi 75.32% dari jumlah individu yang melakukan aktifitas fisik sebanyak 12.595 dibandingkan jumlah sasaran sebanyak 20.169. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya olah raga secara rutin dan teratur. Kedepan Dinas Kesehatan Bersama dengan OPD lain terus memotifasi dan promosi kepada seluruh masyarakat akan pentingnya olah raga/aktifitas fisik dengan cara melakukan senam bersama yang dilakukan 2 kali dalam sebulan yang dilakukan dengan OPD lain dan setiap hari minggu untuk masyarakat.
10. Tidak Merokok Dalam Rumah Pada Tahun 2017 kinerja kegiatannya 45.45% pada tahun 2018 naik menjadi 57.02% dari angka individu yang tidak merokok sebanyak 7.091 dibandingkan sasaran sebanyak 10.927. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya perilaku masyarakat tentang bahaya merokok dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terus memotifasi dan promosi kepada seluruh masyarakat akan pentingnya bahaya merokok dan telah mengeluarkan Perda Kawasan tanpa Rokok no 2 Tahun 2014 dan Perwakonya no.8 tahun 2016.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat dilaksanakan melalui 4 (Empat) Program dan 20 (dua puluh) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp.8.992.414.849,- dengan realisasi sebesar 5.664.243.094,- atau 62,98 %.4 (empat) Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Lingkungan Sehat
2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan
3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
4. Upaya Kesehatan Masyarakat

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- a. Masih ada rumah masyarakat yang memiliki jamban yang belum memenuhi syarat.
- b. Lahan masyarakat yang terbatas untuk membuat septic tank dan sumber air bersih karena lokasi rumah berada pada tempat yang ketinggian dan belum terjangkau oleh PDAM.
- c. Air PDAM yang sering mati dan kurang bersih.
- d. Belum maksimalnya pelaksanaan Perda tentang Kawasan Tertib Rokok Masih kurangnya sarana tempat merokok.
- e. Terdapat perubahan indikator perhitungan hasil akhir keluarga yang ber PHBS dimana jika salah satu dari 10 indikator maka keluarga tersebut langsung dikatakan tidak ber PHBS.
- f. Masih kurangnya pembinaan langsung ke rumah sasaran keluarga yang tidak ber PHBS terutama pada indikator CTPS,timbang balita dan tidak merokok di dalam rumah.

Dari berbagai kendala tersebut hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan :

1. Kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup agar setiap pembangunan dilengkapi dengan sarana air bersih dan jamban yang memenuhi syarat kesehatan.

2. Memberikan himbauan kepada masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal di sekitar rumah masing-masing.
3. PDAM perlu menambah jaringan perpipaan dan revitalisasi pipa yang ada.
4. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi Perda KTR Nomor 2 tahun 2018 ke seluruh OPD dengan menerapkan reword dan panishment
5. Mengintensifkan kegiatan preventif dan Promotif diseluruh lingkungan masyarakat dan media promosi yang edukatif dan inovatif
6. Penambahan jumlah Pos Bindu.
7. Akan lebih meningkatkan pembinaan ke sasaran rumah tangga yang terdapat dari 10 indikator yang tidak terpenuhi dengan melibatkan bidan kelurahan, kader poskeskel dan langsung di evaluasi oleh pemegang program.
8. Lebih mengintensifkan penyuluhan pada ibu dan balita di posyandu terkait CTPS persalinan nakes dan tidak merokok di rumah.

Tabel. 3.7
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja RPJM
Tahun 2013 -2018 Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2018
1.	Persentase Cakupan Prilaku Hidup Bersih Sehat	31.90%	53.80%	61.30%	61.64%	41.85%	75.00 %
2.	Capaian tatanan Kota Sehat	6 tatanan	6 tatanan	8 tatanan	8 tatanan	8 tatanan	8 tatanan

Tabel. 3.8
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Prilaku Hidup Bersih Sehat
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang		Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat	
		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018
1.	Persentase Cakupan Prilaku Hidup Bersih Sehat	75.00%	41.85%	63.16%	79.20%

Pada tabel 3.8 terdapat perbandingan indikator Persentase Cakupan Prilaku Hidup Bersih Sehat dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dimana Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Persentase kinerja pada indikator Cakupan Prilaku Hidup Bersih Sehat sudah mencapai 79.20%.

Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sebesar 41.85%, ini masih jauh dibawah capaian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang disebabkan masih rendah prilaku masyarakat, sehingga harus diaktifkan lagi upaya untuk pencapaian perubahan prilaku masyarakat terhadap kebiasaan hidup sehat terumata untuk indikator-indikator dibawah target.

Pada indikator Capaian Tatanan Kota Sehat untuk Kota Padang Panjang adalah 100% dari 8 tatanan. Adapun 8 tatanan dari kota sehat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tatanan Kawasan pemukiman sarana dan prasarana sehat
2. Tatanan Kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi
3. Tatanan Kawasan industri dan perkotaan sehat
4. Tatanan Kawasan pariwisata sehat
5. Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi
6. Tatanan Kehidupan masyarakat sehat dan mandiri
7. Tatanan Kehidupan sosial yang sehat.
8. Tatanan Hutan Sehat

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran tatanan Kota Sehat adalah:

1. Kerjasama dengan lintas sektor
2. Keaktifan forum Kota sehat dalam mengumpulkan dan mempersiapkan dokumen untuk penilaian dan evaluasi tatanan kota sehat berikutnya
3. Dinas Kesehatan sebagai Liding Sektor yang bertugas untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan lintas sector untuk untuk dapat menjalankan terkait urusan tatanan kota sehat.

Untuk kedepannya Dinas Kesehatan akan tetap mempertahankan kinerja melalui koordinasi lintas sector dengan semua OPD tatanan yang terkait dengan Kota Sehat.

SASARAN 2 : Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Salah satu wujud keberhasilan bidang kesehatan adalah meningkatnya persentase kesehatan masyarakat. Keberhasilan kesehatan tersebut salah satunya dapat dilihat dari Meningkatnya status gizi masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Kesehatan Kota selalu berupaya dalam peningkatan status gizi masyarakat dengan melaksanakan perbaikan gizi masyarakat, serta melaksanakan pemantauan kesehatan masyarakat secara berkala.

Tabel : 3.9
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		Capaian %
		2017	2018	2017	2018	2018
1	Persentase Status Gizi Kurang	5.00%	5.00%	5.76%	5.50%	90.90%

Realisasi Persentase penurunan status gizi kurang tahun 2017 adalah sebanyak 5.76% dari target 5.00%, dan realisasinya sebesar 5.50% pada tahun 2018 dari target 5.00% pada tahun 2018 dengan tingkat capaian sebesar 90.90% dari jumlah balita yang ditimbang pada tahun 2018 sebanyak 3.293 dan terdapat balita gizi kurang sebanyak 182 orang.

Tabel. 3.10
Tingkat Capaian Indikator Kinerja terhadap target kinerja RPJM Tahun 2013 - 2018 Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Target
		2014	2015	2016	2017	2018	2018
1.	Persentase status gizi kurang	5.10%	5.60%	5.82%	5.76%	5.50%	5.00 %

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya status gizi masyarakat pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin dengan anggaran Rp.36.700.000 ,Sosialisasi Penanggulangan Kurang Energi dan Protein (KEP), Anemia gizi besi,Gangguan akibat kurang yodium (GAKY),kurang Vit.A dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya dengan anggaran Rp. 31.130.0000 dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi dengan anggaran Rp. 5.552.000 dengan Realisasi Keuangan Program sebesar 82.57% dan Fisik Program nya sebesar 100%

Penghambat dalam pencapaian program dan kegiatan adalah :

1. Prilaku orang tua/pengasuh yang kurang mendukung pemberian makan balita sesuai dengan usianya (PMBA)
2. Daya beli makanan masyarakat yang masih rendah
3. Belum optimalnya pemantaun status gizi balita
4. Kurang Pedulinya lingkungan masyarakat terhadap status kesehatan dan gizi balita yang berada di lingkungannya
5. Masih rendahnya kepedulian ibu balita terhadap manfaat Posyandu sebagai wadah tempat pemantauan pertumbuhan balita.

6. Kurangnya dukungan dari lintas sektor dalam peningkatan kunjungan ke Posyandu.

Dari berbagai kendala tersebut hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan :

1. Mengaktifkan Pokjanel posyandu mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota.
2. Mengintensifkan promosi dan penyuluhan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam pelaksanaan program kesehatan secara umum.
4. Advokasi dengan Lintas Sektor untuk pembentukan pos gizi di setiap kecamatan.
5. Meningkatkan Koordinasi lintas sektor untuk peningkatan monitoring dan kunjungan ke posyandu.

Tabel: 3.11
Gambaran Status Gizi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	DKK Kota Padang Panjang	Prov. Sumbar	Nasional
1.	Persentase status gizi kurang	5.50%	18.90%	17.70%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Indikator kinerja Persentase status gizi kurang untuk Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang masih jauh dibawah Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar dan Nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa balita kurang gizi dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang rendah.

SASARAN 3 : Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas SDM Pelayanan Dasar

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tidak cukup hanya dengan program-program peningkatan sarana dan prasarana, akan tetapi juga harus ditunjang dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan penempatannya.

Sehingga dalam mewujudkan hal tersebut disamping menempatkan Tenaga Kesehatan yang sesuai dengan keahliannya juga harus ditunjang dengan peningkatan keahliannya. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran.

Tabel : 3.12
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas SDM Pelayanan Dasar

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		Capaian %
		2017	2018	2017	2018	2018
1	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai standart	80%	80%	80%	80%	100%

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar memperlihatkan realisasi tercapai 80.00% dari target yaitu 80%.Hal ini menunjukkan bahwa pada sasaran

ini sesuai dengan target dengan capaian kinerja sebesar 100%.Hal ini menunjukkan bahwa pada sasaran ini sesuai dengan target, dimana Sumber Daya Kesehatan yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan telah dilatih untuk meningkatkan kualitas dan keterampilannya.

Tabel: 3.13
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Target Kinerja RPJM Tahun 2013 - 2018 Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2018
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai standar	65.00%	65.90%	80%	80%	80%	80%

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan penempatan dilaksanakan melalui dua program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dengan anggaran pada tahun 2018 sebanyak Rp. 325.000.000 dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undang dengan anggaran Rp.82.301.656 pada Tahun 2018.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Adanya kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan di tingkat provinsi atau pusat.
2. Adanya pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan sesuai dengan kompetensi.
3. Meningkatnya jumlah SDM yang memiliki keahlian di bidang kesehatan dan informasi teknologi (IT).

Faktor Penghambat dalam pencapaian program dan kegiatan adalah:

1. Masih adanya penempatan dan penugasan tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya.
2. Sistem informasi kesehatan sudah berjalan dengan perangkat dan aplikasi dari pusat dan propinsi sementara untuk ruang lingkup Dinas Kesehatan, Puskesmas beserta jaringannya. Informasi Kesehatan masih dilaporkan secara manual dengan pengiriman Hardcopy ke Dinas Kesehatan.
3. Belum optimalnya pengolahan dan analisa data kesehatan yang berguna dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Dari berbagai kendala tersebut hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan :

1. Dengan adanya kegiatan pengiriman Tenaga Kesehatan untuk melaksanakan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan.
2. Pengiriman Tenaga Penyuluh Kesehatan untuk melaksanakan Pendidikan Penyuluhan Kesehatan sesuai dengan kompetensi.

SASARAN4 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan kesehatan

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan merupakan penunjang dalam keberhasilan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran.

**Tabel 3.14 :
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan**

INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	CAPAIAN %
1 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	2 PKM	4 Pkm	4 PKM	100%
2 Pembangunan Puskesmas representatif (sesuai standar)	100%	100%	100%	100%

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran peningkatan Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian 100%. Dengan kriteria penilaian kinerja "sangat baik".

Tabel: 3.15
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2018 terhadap target kinerja RPJM Tahun 2013 -2018 Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2018
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	0	0	2 Pkm	2 Pkm	4 Pkm	4 Pkm
2	Pembangunan Puskesmas representatif (sesuai standar)	0	0	50%	50%	100%	100%

Untuk mendukung pencapaian sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dilaksanakan melalui 2 (tiga) program yaitu :

1. Pelayanan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, dengan anggaran seluruh program pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.340.097.000 dan realisasi keuangan 85.42% dan Fisik program sebesar 90% sebesar kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 2. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
 3. Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat kantor
 4. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
 5. Peninjang Operasional DAK
 6. Pensertifikatan Tanah Milik daerah

2. Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya dengan anggaran Program sebesar Rp. 539.842.450 dan realisasi keuangan sebesar 67.39% dan Fisik Program 96.65% dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Puskesmas
2. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Adanya dukungan anggaran dari daerah dan pusat
2. Tersediaanya SDM yang handal dalam persiapan, pembinaan dan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas.
3. Dukungan dari berbagai pihak sebagai Akreditasi Puskesmas dapat terlaksana.

Faktor Penghambat dalam pencapaian program dan kegiatan adalah:

1. Terbatasnya lahan dan lokasi untuk pengembangan sarana dan prasana kesehatan.

Dari berbagai kendala tersebut hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan :

1. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas yang sesuai standar.
2. Melaksanakan pembinaan dan monitoring rutin pelaksanaan Akreditasi
3. Melakukan Koordinasi lintas sector untuk pengembangan gedung Puskesmas.

C. Realisasi Anggaran

Tabel : 3.16
**REALISASI ANGGARAN PER SASARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA
 DINAS KESEHATAN TAHUN 2018**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	Persentase Cakupan Prilaku Hidup Bersih Sehat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 2. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 3. Sosialisasi Kesehatan Kerja dan Olah raga 4. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi 2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 3. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 5. Penerapan Monitoring dan evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (DBHCHT)	Rp. 11.455.000 Rp. 18.525.000 Rp. 63.840.000 Rp. 10.518.000 Rp. 46.750.000 Rp. 58.250.000 Rp. 42.510.000 Rp. 69.500.000	Rp. 11.367.300 Rp. 18.429.600 Rp. 60.856.362 Rp. 8.627.950 Rp. 40.780.000 Rp. 32.490.700 Rp. 39.168.400 Rp. 24.965.400	99,23% 99,49% 95,33% 82,03% 87,23% 90,11% 92,14% 35,92%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 27.000.000	Rp.25.477.200	94.36%
	2.	Pencegahan Penularan Penyakit endemik dan epidemik	Rp. 15.000.000	Rp. 8.980.375	59.87%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.	Peningkatan Surveillance dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Rp. 147.825.000	Rp. 147.825.000	100%
	2.	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Rp. 190.975.200	Rp. 177.167.369	92.77%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1.	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Rp. 262.500.000	Rp. 259.350.000	98.80%
	1.	Forum Kota Sehat (Pengembangan Tatanan Kota Sehat)	Rp. 233.320.000	Rp. 219.350.120	94.01%
Capaian tatanan Kota Sehat	2.	Pembakaran sampah Medis	Rp. 23.600.000	Rp. 23.600.000	100%

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan	1.	Pengembangan Desa Siaga	Rp. 84.150.000	Rp. 72.223.400	85,83%	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.	Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk	Rp. 8.690.000	Rp. 7.000.800	80,56%
		2.	Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah	Rp. 91.352.000	Rp. 85.322.400	93,40%
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.	Revitalisasi Sistem	Rp. 46.550.000	Rp. 42.602.000	91,52%
2.		Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 3.900.000	Rp. 1.417.500	36,35%	
3.		Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Rp. 10.058.000	Rp. 9.989.000	99,31%	
4.		Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Rp. 3.924.159.600	Rp. 3.448.015.100	87,87%	

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.	Pemetaan ibu hamil dan penjarangan ibu hamil resiko tinggi	Rp. 1.380.000	-	0%
	2.	Revitalisasi Gerakan sayang Ibu	Rp. 5.905.000	-	0%
	3.	DAK Jaminan Persalinan (Jamperal)	Rp. 1.121.007.000	-	0%
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 145.200.000	Rp. 144.713.935	99,67%
	2.	Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluarsa	Rp. 26.575.000	Rp. 26.269.200	98,85%
	3.	DAK Pelayanan Kefarmasian	Rp. 834.000.000	Rp. 788.820.666	94,58%
Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Rp. 49.550.000	Rp. 47.765.000	96,40%
	2.	Sosialisasi dan pemeriksaan Napza	Rp. 6.945.000	Rp. 4.632.800	66,71%
	3.	Pembinaan, Pembinaan dan Pengendalian obat kosmetik dan obat Tradisional	Rp. 17.500.000	Rp. 13.450.000	76,86%

2. Meningkatkan Status Gizi Masyarakat	Persentase Gizi Kurang	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Rp. 36.700.000	Rp. 26.063.650	71,02%
			2. Sosialisasi KEP, Anemis Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit Adan Kekurangan zat gizi Mikro lainnya	Rp. 31.130.000	Rp. 30.283.600	97,28%
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan pelayanan dasar	Presentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai penempatan standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apertur	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Rp. 82.301.656	Rp. 72.365.361	87,93%
			3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	Rp. 5.552.000	Rp. 4.241.200	76,39%
			1. Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 24.300.000	Rp. 22.745.100	93,60%
			2. Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Rp. 325.000.000	Rp. 322.474.819	99,22%
			3. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Rp. 97.282.000	Rp. 96.700.000	99,40%
			4. Penyediaan Jasa medis	Rp. 125.403.736	Rp. 99.000.239	78,95%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp. 3.685.000	Rp. 2.382.000	64,64%
	2.	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya air, listrik	Rp. 192.399.996	Rp. 145.577.764	75,66%
	3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Rp. 813.048.500	Rp. 701.465.383	86,28%
	4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 451.909.000	Rp. 421.962.227	93,37%
	5.	Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 22.326.086	Rp. 19.348.900	86,66%
	6.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Rp. 88.175.000	Rp. 74.911.724	84,96%
	7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Rp. 23.500.000	Rp. 21.635.126	92,06%
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	Rp. 150.000	Rp. 150.000	100%
	2.	Penyusunan pelaporan keuangan semester	Rp. 150.000	Rp. 150.000	100%
	3.	Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi	Rp. 150.000	Rp. 150.000	100%

4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Rp. 69.000.000	Rp. 69.980.095	99,97%
			2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Rp. 387.842.450	Rp.263.463.400	67,93%
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	Rp. 83.000.000	Rp. 31.335.300	37,75%
			1.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)	Rp. 2.947.506.910	Rp. 2.029.667.893	68,86%
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp. 72.147.000	Rp. 66.827.100	92,63%
			2.	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Rp. 50.000.000	Rp. 23.271.240	46,54%
			3.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Rp. 22.000.000	Rp. 15.895.000	72,25%
			4.	DAK bidang kesehatan	Rp. 2.962.200.000	Rp. 2.573595.616	86,88%

			5.	Penunjang operasional DAK	Rp. 225.050.000	Rp. 173.605.985	77.14%
			1.	Pembangunan Puskesmas	-		
			2.	Penataan penggunaan ,pemilikan,penggunaan dan pematatan tanah	-		
	Pembangunan Puskesmas representatif (sesuai standar)	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya					
JUMLAH					Rp. 21.063.459.601	Rp. 15.571.345.921	73.93%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Anggaran pada tahun 2018 sebanyak Rp. 21.063.459.601 dan realisasi sebesar Rp. 15.571.345.921 dengan persentase keuangan sebesar 73.93 %. Terdapat beberapa kegiatan yang penyerapan Anggarannya masih rendah di antaranya:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan dana sebesar Rp.3.685.000 realisasi keuangan Rp.2.382.000 (64,64%)
Permasalahan: Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena biaya untuk surat menyurat disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi anggran.
- a. Pemeliharaan rutin gedung kantor dengan dana sebesar Rp.50.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp.23.271.240. (46,54 %)
Permasalahan: Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena biaya pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan.
Solusi: Kedepannya akan meningkatkan kualitas penyusunan rencana kegiatan.
- b. Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah dengan dana sebesar Rp.8.700.000 realisasi 0 (0%)
Permasalahan: tidak teralisasinya keuangan dan realisasi fisik yg rendah disebabkan karena pemilik tanah tidak bersedia menyerahkan / menghibahkan tanahnya untuk disertikatkan atas nama pemerintah daerah.
Solusi: Akan dilakukan pendekatan secara intensif.

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat:

- a. Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan dengan Pagu anggaran sebesar Rp.3.900.000,- dengan realisasi keuangan Rp.1.417.500,- (36,35) dan realisasi fisik 85 %
Permasalahan: Anggaran untuk kegiatan ini tersedia pada DPA perubahan, sebagian kegiatan telah dilaksanakan tetapi untuk Finalisasi Formularium waktu tidak mencukupi.

Solusi: Finalisasi Formularium akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2019.

- b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kebun Sikolos dengan dana sebesar Rp1.501.511.194,- dengan realisasi keuangan Rp.1.032.025.239,- (68,73 %) dan realisasi fisik 100%
Permasalahan : Realisasi Keuangan hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 1.032.025.239,- (68,73 %) disebabkan karena dana Kapitasi JKN sesuai dengan Juknis diperuntukan 60 % untuk Jasa Medis 40 % untuk Operasional , pembelian Obat / BMHP,rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena anggaran obat telah terpenuhi dari Dana DAK kefarmasian
Solusi: Untuk pengadaan Obat/BMHP di Tahun berikutnya akan mengurangi dana yang bersumber dari dana APBD Kefarmasiaan agar dana untuk pembelian Obat dan BMHP yg bersumber dari dana JKN dapat terserap lebih Optimal.
- c. Peningkatan pelayanan di Puskesmas Gunung (JKN) dengan dana sebesar Rp.745.940.651,-. Dimana realisasi realisasi keuangan Rp.392.370.330,- (52,60)dan realisasi fisiknya 100 %.
Permasalahan Realisasi Keuangan hanya dapat terealisasi sebesar Rp.392.370.330,- (52,60) disebabkan karena dana Kapitasi JKN sesuai dengan Juknis diperuntukan 60 % untuk Jasa Medis 40 % untuk Operasional , pembelian Obat / BMHP rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena anggaran obat telah terpenuhi dari Dana DAK kefarmasian
Solusi:Untuk pengadaan Obat/BMHP di Tahun berikutnya akan mengurangi dana yang bersumber dari dana APBD Kefarmasiaan agar dana untuk pembelian Obat dan BMHP yg bersumber dari dana JKN dapat terserap lebih Optimal.

- d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Koto Katik dengan dana sebesar Rp 739.531.080,- dengan realisasi keuangan Rp.374.803.414,- (50,68%) dan realisasi fisik 100%

Permasalahan : Realisasi Keuangan hanya dapat terealisasi sebesar 50,68 % disebabkan karena dana Kapitasi JKN sesuai dengan Juknis diperuntukan 60 % untuk Jasa Medis 40 % untuk Operasional dan pembelian Obat / BHMP, rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena anggaran obat telah terpenuhi dari Dana DAK kefarmasian

Solusi : Untuk pengadaan Obat/BMHP di Tahun berikutnya akan mengurangi dana yang bersumber dari dana APBD Kefarmasian agar dana untuk pembelian Obat dan BMHP yg bersumber dari dana JKN dapat terserap lebih Optimal

- e. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bukit Surungan dengan dana sebesar Rp.1.240.427.542,- dengan realisasi keuangan Rp.595.349.979,- (48%) dan realisasi fisik 100 %.

Permasalahan : Realisasi Keuangan hanya dapat terealisasi sebesar 48 % disebabkan karena dana Kapitasi JKN sesuai dengan Juknis diperuntukan 60 % untuk Jasa Medis 40 % untuk Operasional dan pembelian Obat / BHMP, rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena anggaran obat telah terpenuhi dari Dana DAK kefarmasian

Solusi: Untuk pengadaan Obat/BMHP di Tahun berikutnya akan mengurangi dana yang bersumber dari dana APBD Kefarmasian agar dana untuk pembelian Obat dan BMHP yg bersumber dari dana JKN dapat terserap lebih Optimal

- f. DAK Non Fisik (BOK) dengan dana Rp. 2.947.506.910,- dengan realisasi keuangan Rp.2.029.667.893 (68,86%) % dan realisasi fisik 100 %.

Permasalahan: Realisasi Keuangan hanya dapat terealisasi sebesar 68 % disebabkan karena sesuai ketentuan yang berlaku honor nara sumber yang berasal dari OPD pelaksana tidak dibayarkan walaupun demikian kegiatan tersebut tetap dilaksanakan .

Solusi: Untuk Tahun 2019 honor nara sumber yang berasal dari OPD tidak dianggarkan lagi .

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan:

1. Penerapan Monitoring dan evaluasi kawasan tanpa rokok dengan dana sebesar Rp. 69.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp.24.965.400 (35,92 %) dan realisasi fisik 100 %.

Permasalahan: Realisasi keuangan hanya sebesar Rp 24.965.400 (35,92%) hal ini disebabkan karena:

- a. Dana kegiatan tersebut tersedia di perubahan anggaran
- b. Monev dilaksanakan dengan menggunakan dana Monev pada dana DAK Nofisi (BOK)
- c. Petugas Pelaksana Monev adalah PNS sehingga transport non PNS tidak banyak yg bisa direalisasikan.

Solusi : Untuk Tahun 2019 dan seterusnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dengan memprioritaskan alokasi dana DAK Non fisik (BOK).

4. Program Perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan:

1. Pemberian makanan dan vitamin dengan dana sebesar Rp. 36.700.000,- dengan realisasi keuangan 26.063.650 (71,02 %) dan realisasi fisik 100 %.

Permasalahan Realisasi Keuangan hanya 71,02 % karena hanya ada 24 balita yang diberikan makanan tambahan gizi melalui pos gizi

Solusi: untuk tahun berikutnya dana di sesuaikan dengan kasus tahun sebelumnya

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan kegiatan:

1. Pencegahan penularan penyakit endemic/epidemik dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi keuangan 8.980.375,- (59,87 %) dan realisasi fisik 100 %.

Permasalahan:Keuangan hanya terealisasi 59,87 % dikarenakan tidak adanya KLB di Kota Padang Panjang tahun ini sehingga anggaran yg telah tersedia tidak direalisasikan (makan minum)

Solusi: Untuk tahun berikutnya perencanaan disesuaikan dengan data tahun ini .

6. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan kegiatan:

- a. Pengadaan sarana dan prasaran Puskesmas dengan dana sebesar Rp. 387.842.450,- dengan realisasi keuangan 263.463.400,-(67,93 %) dan realisasi fisik 86,96 %.

Permasalahan: BM Pengadaan alat pengolahan air kotor tidak dapat terlaksana disebabkan karena anggaran tersedia pada DPA perubahan, sedang untuk kegiatan ini rencananya adalah membuat bak-bak pembuangan air limbah, karena waktu dan cuaca yg tidak mendukung maka kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan .

Solusi: Pengadaan alat pengolahan air kotor akan dianggarkan pada tahun berikutnya dan pelaksanaannya akan dilakukan pada awal tahun anggaran.

- b. Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana Puskesmas dengan dana sebesar Rp. 83.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.31.335.300 (37,75 %) dan realisasi fisik 100 %.

Permasalahan: Realisasi keuangan hanya sebesar Rp.31.335.300 (37,75 %) anggaran ini digunakan untuk pemeliharaan gedung dan alat kesehatan, dimana anggaran yg dikeluarkan hanya untuk pemeliharaan alat kesehatan yg rusak .

Solusi: Untuk tahun berikutnya akan dilakukan pemeliharaan alat secara kesehatan secara berkala dan bukan untuk alat kesehatan yg rusak saja .

9. **Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan**, dengan kegiatan:

- a. Pemetaan ibu hamil dan penjarangan ibu hamil resiko tinggi dengan dana sebesar Rp. 1.380.000,- dengan realisasi keuangan 0 (0%) dan realisasi fisik 80 %.

Permasalahan: Rapat/ pembahasan dan rumusan finalisasi Audit Maternal Perinatal (AMP) pada akhir tahun tidak dapat diselesaikan.

Solusi: Rapat/ pembahasan dan rumusan finalisasi Audit Maternal Perinatal akan diselesaikan awal Tahun 2019.

- b. Revitalisasi Gerakan Sayang ibu dengan dana sebesar Rp. 5.905.000,- dengan realisasi keuangan 0 (0%) dan realisasi fisik 100 %.

Permasalahan: Realisasi keuangan 0 % ini disebabkan karena dana untuk Kegiatan ini tersedia pada dana DAK Non Fisik (BOK).

Solusi: Untuk Tahun berikutnya dana BOK dipergunakan untuk kegiatan yang lain.

- c. Jaminan persalinan (Jampersal) dengan dana sebesar Rp. 1.121.007.000,- dengan realisasi keuangan 0 (0 %) dan realisasi fisik 100 %.

Permasalahan: Karena dana Jampersal peruntukannya hanya untuk Biaya persalinan dan Rumah tunggu. Sedangkan semua ibu hamil dikota Padang Panjang persalinannya telah biyai /di tanggung oleh JKN KIS/JKSS/JKMP. Untuk rumah tunggu jarak antara kelurahan dan fasilitas kesehatan di kota panjang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Anggaran tersebut juga merupakan alokasi langsung dari Kemenkes dan bukan merupakan usulan Kabupaten/Kota.

Solusi: Mengusulkan kepada Kemenkes untuk pengurangan dana DAK Jampersal untuk kegiatan yang lain.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja SKPD ini sangat perlu dalam pengambilan kebijakan pada kegiatan tahun berikutnya.
2. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan evaluasi kuantitatif terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2018 yang dinilai melalui Indikator Kinerja Outcome.
3. Laporan ini sebagai bahan tolok ukur kinerja terhadap tercapainya Renstra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
4. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang secara umum pada Tahun 2018 telah tercapai dengan sasaran yang diinginkan terutama target fisik dan untuk keuangan masih belum sesuai dengan target.
5. Laporan Kinerja OPD merupakan tolok ukur dan barometer kinerja pegawai maupun pimpinan OPD dalam mengemban tugas yang diberikan sesuai dengan tupoksi.

4.2 Saran

1. Semoga Laporan Kinerja OPD ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program kegiatan Dinas kesehatan di Tahun 2019.
2. Semoga program dan kegiatan yang telah dilaksanakan akan lebih meningkat lagi baik dari sisi pendanaan maupun pelaksanaan administrasi keuangannya untuk Tahun 2019.

3. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018.

Padang Panjang, 20 Januari 2019

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Padang Panjang



Drs. Nuryanuwar. Apt. MM. M. Kes

NIP. 19620123199101100